

2024

PEDOMAN PETA PROSES DAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Proses bisnis merupakan salah satu elemen kunci yang menjadi tulang punggung dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan. Proses Bisnis merupakan salah satu dari 6 (enam) domain dalam kerangka arsitektur SPBE sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 132 Tahun 2022, yang berarti bahwa proses bisnis menjadi dasar bagaimana organisasi mengelola, mengkoordinasikan, dan mengoptimalkan seluruh kegiatan untuk mencapai visi dan misi instansi

Pedoman penyusunan proses bisnis di BPS ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi seluruh unit kerja di BPS untuk menyusun proses bisnis yang standar dan merujuk pada peta proses bisnis BPS yang telah disusun. Hal tersebut guna memastikan bahwa proses bisnis yang disusun telah selaras dengan fungsi-fungsi bisnis pemerintahan BPS. Dengan demikian dalam pedoman ini juga tertera Peta Proses Bisnis BPS yang mencakup Peta Proses Bisnis Level 0, Sub Peta Proses Bisnis, Peta Relasi serta Peta Lintas Fungsi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN-RB no 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang mendukung proses penyusunan dokumen Pedoman penyusunan proses bisnis di BPS ini. Semoga dokumen ini dapat membantu BPS dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel , serta mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien

Jakarta, 2 Januari 2024

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik



Dr. Eng. Imam Machdi, MT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I.....	5
KETENTUAN UMUM	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. DASAR HUKUM	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. RUANG LINGKUP.....	8
E. DEFINISI.....	9
BAB II.....	10
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS	10
BADAN PUSAT STATISTIK	10
A. PETA PROSES BISNIS (LEVEL 0).....	13
B. SUB PETA PROSES BISNIS (LEVEL 1).....	14
C. PETA RELASI	22
D. PETA LINTAS FUNGSI	23
BAB III	25
PENYUSUNAN PROSES BISNIS	25
BADAN PUSAT STATISTIK	25
A. KAIDAH PENGAMBARAN PROSES BISNIS	25
B. STANDAR PENGAMBARAN PROSES BISNIS	28
C. SIMULASI PENGAMBARAN PROSES BISNIS.....	30
BAB IV	33
PENUTUP	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hirarki Proses Bisnis	11
Gambar 2. Peta Proses Bisnis	12
Gambar 3. Peta Proses Bisnis BPS (Level 0)	13
Gambar 4. Sub Peta Proses Bisnis Spesifikasi Kebutuhan	14
Gambar 5. Sub Peta Proses Bisnis Perancangan Metodologi	14
Gambar 6. Sub Peta Proses Bisnis Pembangunan	15
Gambar 7. Sub Peta Proses Bisnis Pengumpulan Data.....	15
Gambar 8. Sub Peta Proses Bisnis Pengolahan	16
Gambar 9. Sub Peta Proses Bisnis Analisis.....	16
Gambar 10. Sub Peta Proses Bisnis Diseminasi	17
Gambar 11. Sub Peta Proses Bisnis Evaluasi	17
Gambar 12. Sub Peta Proses Bisnis Perencanaan dan Anggaran.....	18
Gambar 13. Sub Peta Proses Bisnis Keuangan.....	18
Gambar 14. Sub Peta Proses Bisnis Pengelolaan SDM.....	19
Gambar 15. Sub Peta Proses Bisnis Layann Hukum dan Kerjasama	19
Gambar 16. Sub Peta Proses Bisnis Layanan Hukum dan Perkantoran	20
Gambar 17. Sub Peta Proses Bisnis Layanan TIK.....	20
Gambar 18. Sub Peta Proses Bisnis Pengendalian Intern	21
Gambar 19. Sub Peta Proses Bisnis Pendidikan dan Pelatihan.....	21
Gambar 20. Peta Relasi Proses Utama	22
Gambar 21. Peta Relasi Proses Pendukung	22
Gambar 22. Peta Relasi Proses Penguat	23
Gambar 23. Peta Lintas Fungsi Spesifikasi Kebutuhan.....	23
Gambar 24. Peta Lintas Fungsi Pengumpulan Data	24
Gambar 25. Peta Lintas Fungsi Menentukan Spesifikasi Kebutuhan	24
Gambar 26. Tahap Penyusunan Peta Proses Bisnis BPS	25
Gambar 27. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis (1)	30
Gambar 28. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis (2)	30
Gambar 29. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis 3)	31
Gambar 30. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis (4)	31
Gambar 31. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis (5)	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Notasi Penggambaran Proses Bisnis Berdasarkan BPMN.....	29
--	----

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan (LPNK) yang menjalankan tugas penyediaan statistik berdasarkan Undang-Undang no 16 Tahun 1997. Dalam melaksanakan tugas pokok BPS juga menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan yang mendukung penyediaan dan pengelolaan data statistik tersebut. Pada sistem pemerintahan, data statistik yang dihasilkan oleh BPS mempunyai peran penting diantaranya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaa, pengendalian serta evaluasi pembangunan. Dengan demikian data statistik berkualitas sangat diharapkan untuk digunakan sebagai dasar kebijakan. Berbagai upaya dilakukan BPS untuk dapat menghasilkan data statistik berkualitas, salah satunya melalui pengembangan dan perbaikan proses bisnis

Proses bisnis merupakan salah satu elemen kunci yang menjadi tulang punggung dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan. Proses Bisnis merupakan salah satu dari 6 (enam) domain dalam kerangka arsitektur SPBE sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 132 Tahun 2022, yang berarti bahwa proses bisnis menjadi dasar bagaimana organisasi mengelola, mengkoordinasikan, dan mengoptimalkan seluruh kegiatan untuk mencapai visi dan misi instansi. Dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyusunan proses bisnis dalam birokrasi pemerintahan memungkinkan setiap langkah proses terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini meningkatkan transparansi, sehingga meminimalkan peluang terjadinya korupsi atau praktik penyalahgunaan wewenang. Dengan proses yang lebih transparan, akuntabilitas di dalam birokrasi juga meningkat, karena setiap keputusan dan tindakan dapat ditelusuri dengan jelas. Selain itu proses bisnis yang terintegrasi secara digital memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif terhadap pelaksanaan tugas-tugas birokrasi. Dengan adanya sistem monitoring yang real-time, pimpinan dapat dengan

cepat mendeteksi dan mengatasi penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan tugas, sehingga mencegah terjadinya masalah yang lebih besar.

Dalam mendukung implementasi manajemen layanan data statistik sebagaimana mandat Perpres 132 Tahun 2022 sebagai inisiatif strategis BPS, proses bisnis akan menjadi dasar pengembangan layanan, identifikasi data dan informasi, perencanaan infrastruktur serta pengelolaan keamanan. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya proses bisnis layanan data statistik tidak akan berjalan optimal. Untuk mendukung hal tersebut, maka setiap unit kerja BPS hendaknya dapat menyusun proses bisnis dari setiap program kegiatan statistik sehingga manajemen layanan data statistik berjalan efektif dan efisien. Selain itu proses bisnis akan menjadi dasar setiap pelaksanaan kegiatan, dasar penentuan kebutuhan anggaran, dasar penyusunan risiko serta menjadi acuan dalam setiap monitoring dan evaluasi. Melalui proses bisnis yang efektif, efisien dan terdigitalisasi harapannya BPS dapat mengembangkan layanan manajemen data statistik baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna data serta membuka peluang untuk BPS dapat berkolaborasi dan menguatkan integrasi lintas instansi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu disusun pedoman proses bisnis di lingkungan Badan Pusat Statistik yang akan menjadi dasar pelaksanaan penyusunan proses bisnis oleh setiap unit kerja.

B. DASAR HUKUM

Pedoman Sekretaris Utama tentang Proses Bisnis di lingkungan BPS, yang selanjutnya disebut Pedoman, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139)
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- e. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- k. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- l. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 94 Tahun 2018 tentang Rencana Transformasi Digital Badan Pusat Statistik;
- m. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Rencana Transformasi Digital Badan Pusat Statistik;
- n. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Transformasi Digital

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai model acuan dan referensi bagi unit kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik dalam menyusun dan mengembangkan peta proses bisnis dan proses bisnis

Sedangkan tujuannya adalah menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya, mendorong setiap unit organisasi memiliki proses bisnis sesuai tugas dan fungsinya, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman penyusunan proses bisnis di lingkungan BPS ini mencakup :

1. Penyusunan Peta Proses Bisnis BPS

Peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi organisasi. Peta proses bisnis BPS menggambarkan fungsi-fungsi pokok BPS baik fungsi utama ataupun fungsi lainnya yang mendukung fungsi utama. Peta proses bisnis BPS menjadi induk untuk menentukan cakupan dan menjabarkan proses bisnis sesuai dengan fungsinya. Peta Proses Bisnis BPS harus selaras dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis BPS serta sesuai dengan Referensi Arsitektur Bisnis pada Arsitektur SPBE Nasional

2. Penyusunan Proses Bisnis BPS

Proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan atau aktifitas untuk menghasilkan sebuah output. Output dari proses bisnis pemerintahan dapat berupa layanan. Idealnya setiap proses bisnis mempunyai kejelasan tujuan, data atau informasi sebagai input dan output serta berkaitan antar satu aktifitas dengan aktifitas lain. Proses bisnis BPS disusun untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik dapat berjalan dan menghasilkan output yang maksimal. Penyusunan proses bisnis BPS juga menjadi dasar dalam tata kelola penyelenggaraan kegiatan statistik. Dalam menyusun proses bisnis BPS harus selaras dengan Peta Proses Bisnis yang telah dibuat

E. DEFINISI

- a. Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling berhubungan yang merubah input menjadi output yang bernilai tambah.
- b. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas sebagai upaya penciptaan nilai tambah di dalam organisasi, sehingga rencana strategis (renstra) organisasi dapat dilaksanakan dengan optimal dalam rangka memberikan mandat organisasi secara konsisten.
- c. Proses Bisnis Utama adalah proses yang meliputi proses inti dan menciptakan aliran nilai utama.
- d. Proses Bisnis Pendukung adalah yang mengendalikan operasional dari seluruh sistem.
- e. Proses Bisnis Penguat adalah proses bisnis yang membantu mendukung ketercapaian proses bisnis utama dalam hal kualitas dan keselarasan terhadap visi misi instansi
- f. Proses Bisnis Sumber Daya adalah proses yang mendukung proses inti.
- g. Peta Proses Bisnis adalah hubungan atau keterkaitan antar pemangku kepentingan yang terjadi antar proses-proses dalam suatu organisasi.
- h. Peta Subproses Bisnis adalah hubungan atau keterkaitan antar pemangku kepentingan yang terjadi antar subproses-subproses dalam suatu organisasi.
- i. Peta Relasi adalah hubungan atau keterkaitan antar pemangku kepentingan yang terjadi antar bagian-bagian dalam suatu organisasi.
- j. Peta Lintas Fungsi adalah menunjukkan bagaimana proses-proses kerja besar organisasi melintas di beberapa fungsi/bagian.
- k. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
BADAN PUSAT STATISTIK

Peta Proses Bisnis BPS merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan BPS sebagai instansi Pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi bisnis dan proses bisnis. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian diturunkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.

Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berikut :

1. Prinsip Fungsi

Penyusunan dan pemetaan Proses bisnis disusun berdasarkan fungsi/kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan untuk menjalankan tugas pokok organisasi, dan bukan berdasarkan unit kerja yang ada

2. Prinsip Efektifitas

Penyusunan proses bisnis harus mempertimbangkan produk/ layanan yang akan dihasilkan dan sesuai dengan kebutuhan

3. Prinsip Efisiensi

Penyusunan dan pengembangan proses bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan/keterlibatan sumber daya yang minimal dan mendukung penyederhanaan organisasi

4. Prinsip Adaptif

Proses bisnis disusun dengan mempertimbangkan fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan bisnis organisasi.

5. Prinsip Representatif

Proses bisnis disusun mewakili seluruh aktifitas organisasi

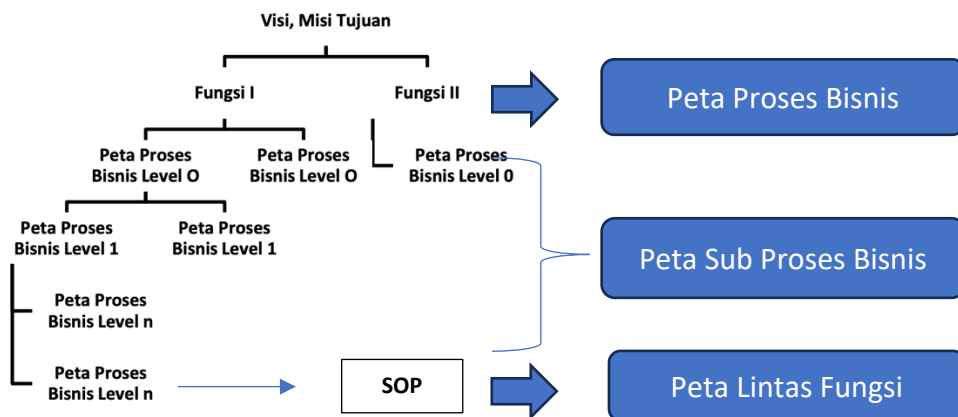
6. Prinsip Kesepakatan (Konsensus)

Penyusunan proses bisnis bersifat subyektif dan kualitatif, karena proses bisnis merupakan cara pandang terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan ataupun aktifitas dalam suatu periode waktu tertentu. Sehingga perlu kesepakatan oleh berbagai pihak terkait terutama pemilik proses bisnis dan pengambilan keputusan oleh pimpinan

Tahapan pengembangan peta proses bisnis mencakup hal-hal berikut :

- a. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan.
- b. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
- c. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Penggambaran peta proses bisnis sesuai dengan kerangka peta proses bisnis pada Peraturan Menteri PANRB No 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis dalam bentuk levelling/hirarki sebagai berikut :

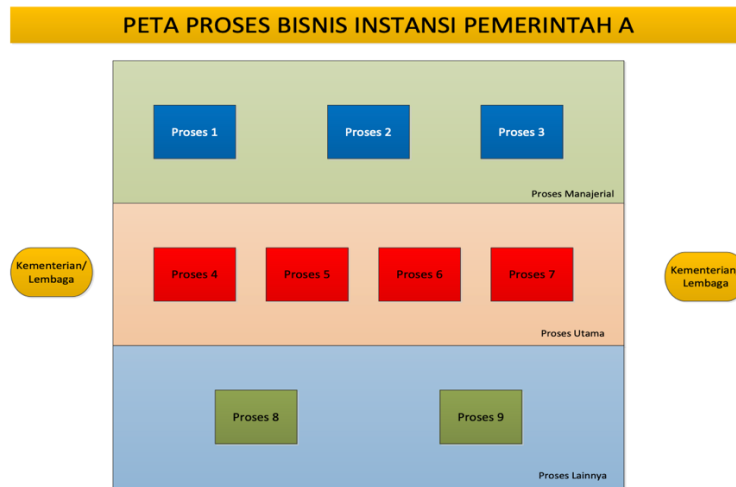


Gambar 1. Hirarki Proses Bisnis

Berdasarkan kerangka diatas, maka penyusunan peta proses bisnis di BPS digambarkan dalam konsep penggambaran peta dengan mempertimbangkan hirarki/levelling yang mencakup :

1. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis digambarkan sesuai dengan panduan pada PermenPANRB no 19 Tahun 2018 dimana penentuan fungsi bisnis BPS selaras dengan Referensi Proses Bisnis sesuai dengan Peraturan Presiden No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Peta proses bisnis menggambarkan level 0 dalam kelompok fungsi bisnis BPS. Adapun format sebagai berikut :



Gambar 2. Peta Proses Bisnis

Penjelasan Gambar 2. Peta Proses Bisnis diatas adalah sebagai berikut :

- Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama di BPS berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, serta berpengaruh langsung terhadap keberhasilan BPS dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi. Proses utama merupakan
- Proses manajerial, yang merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna internal BPS
- Proses lainnya, merupakan proses yang tidak berkaitan langsung namun memberi manfaat bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal BPS

2. Peta Sub-Proses

Peta proses bisnis level 1 merupakan turunan dari peta proses bisnis level 0 , yang menguraikan turunan proses dari setiap proses inti, proses pendukung serta proses lainnya . Selanjutnya peta proses bisnis level 1 juga dapat diturunkan sampai level -n yang disepakati

3. Peta Relasi

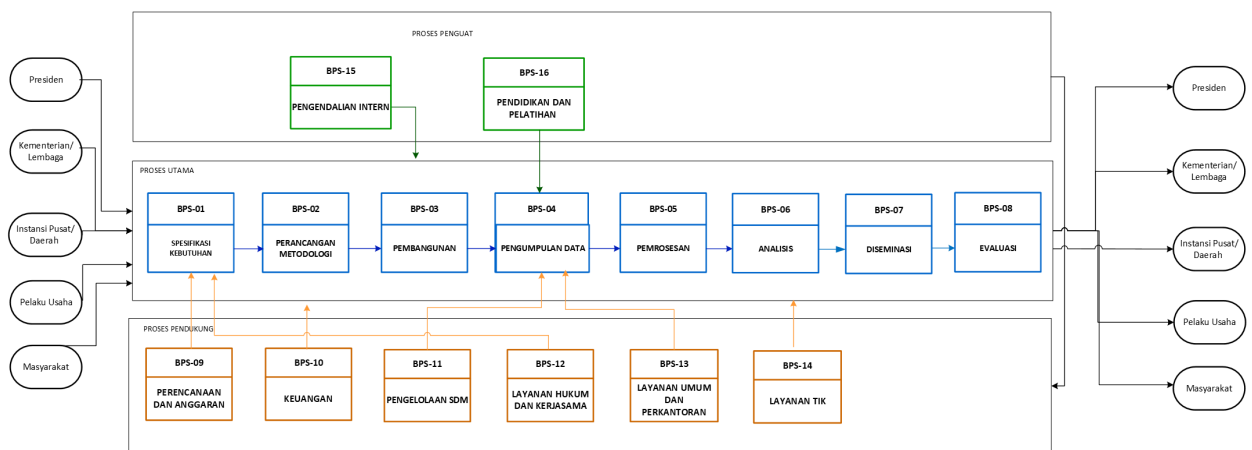
Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Dalam penggambaran peta relasi BPS pihak-pihak yang terlibat dapat digambarkan sebagai unit eselon 1 atau 2

4. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) atau disebut CFM adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Untuk standardisasi CFM digambarkan menggunakan notasi Business Process Modelling Notation (BPMN). Salah satu contoh penggambaran CFM adalah penggambaran *Standard Operating Procedure* (SOP) , namun CFM tidak selalu merupakan SOP.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas maka Peta Proses Bisnis BPS digambarkan sebagai berikut :

A. PETA PROSES BISNIS (LEVEL 0)

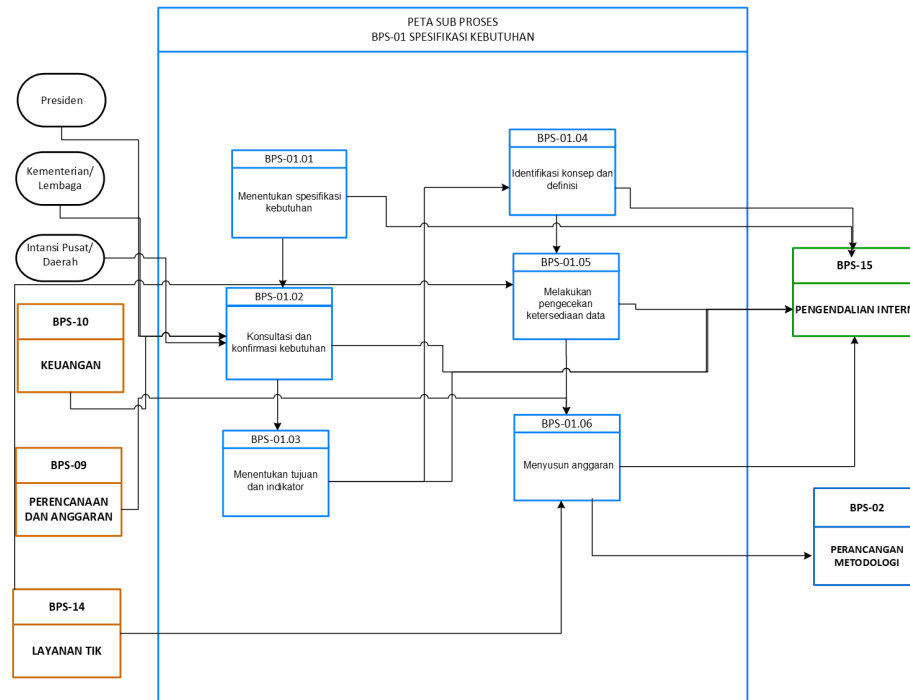


Gambar 3. Peta Proses Bisnis BPS (Level 0)

B. SUB PETA PROSES BISNIS (LEVEL 1)

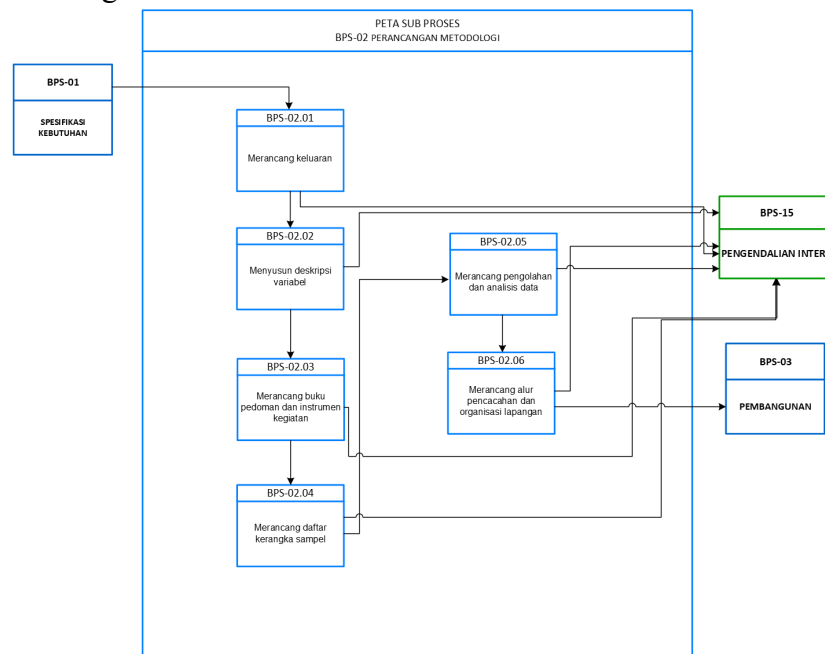
1. Proses Utama

a. BPS-01 Spesifikasi Kebutuhan



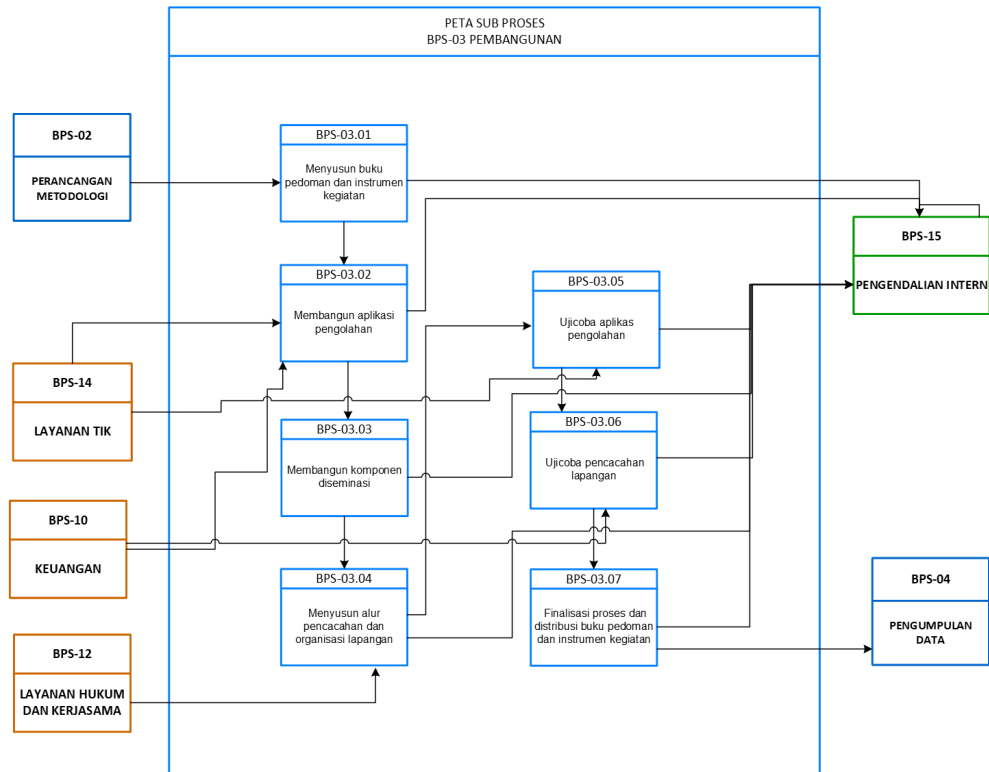
Gambar 4. Sub Peta Proses Bisnis Spesifikasi Kebutuhan

b. BPS-02 Perancangan



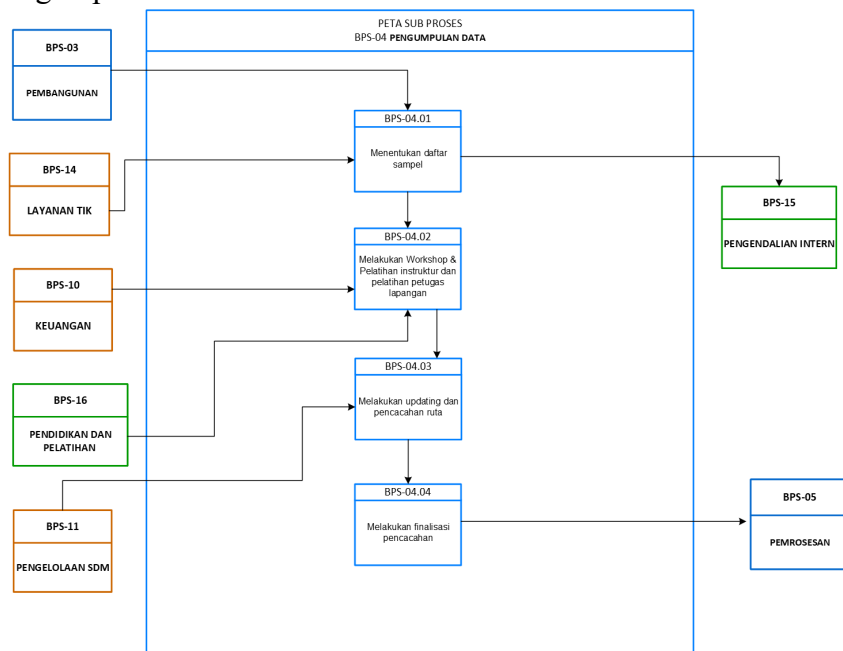
Gambar 5. Sub Peta Proses Bisnis Perancangan Metodologi

c. BPS-03 Pembangunan



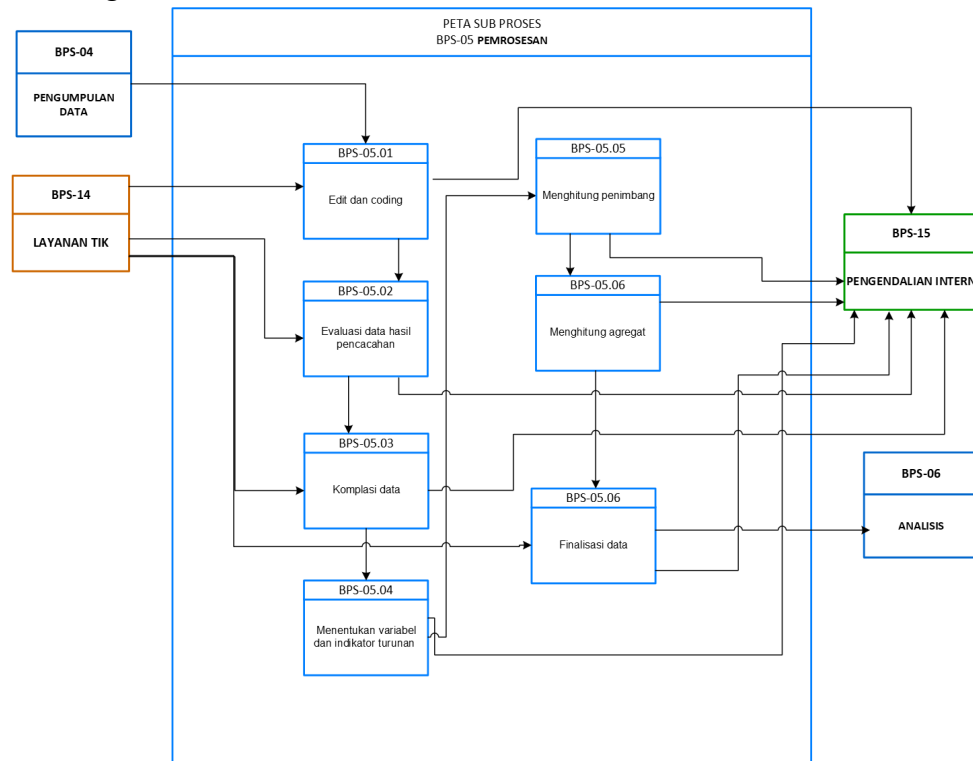
Gambar 6. Sub Peta Proses Bisnis Pembangunan

d. BPS-04 Pengumpulan Data



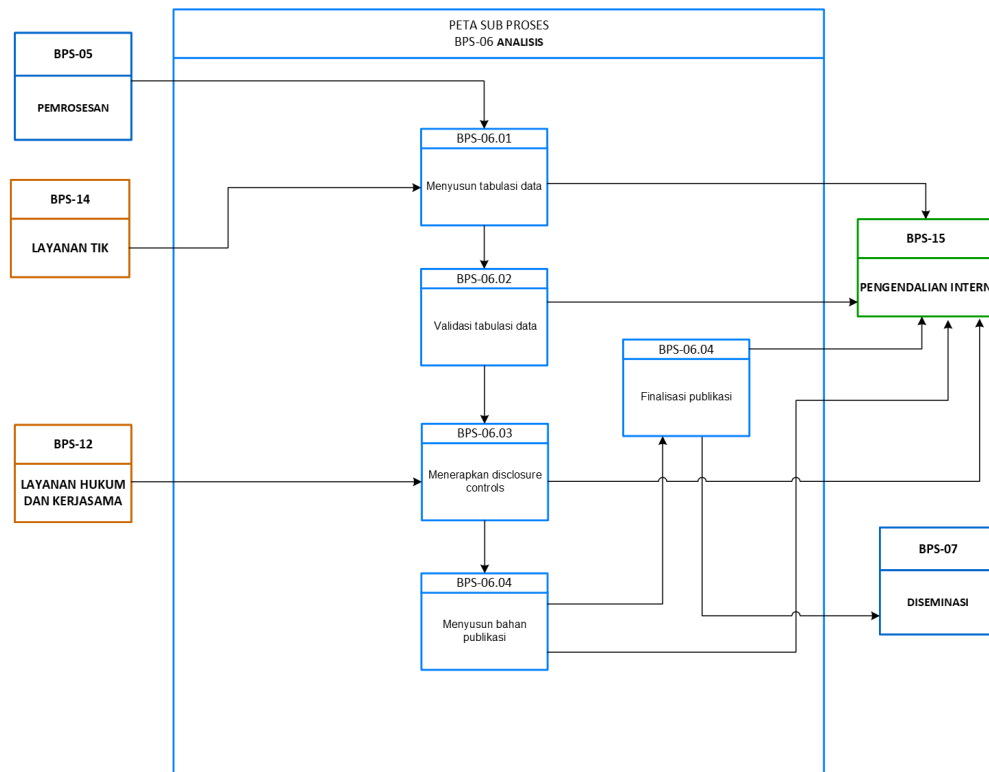
Gambar 7. Sub Peta Proses Bisnis Pengumpulan Data

e. BPS-05 Pengolahan



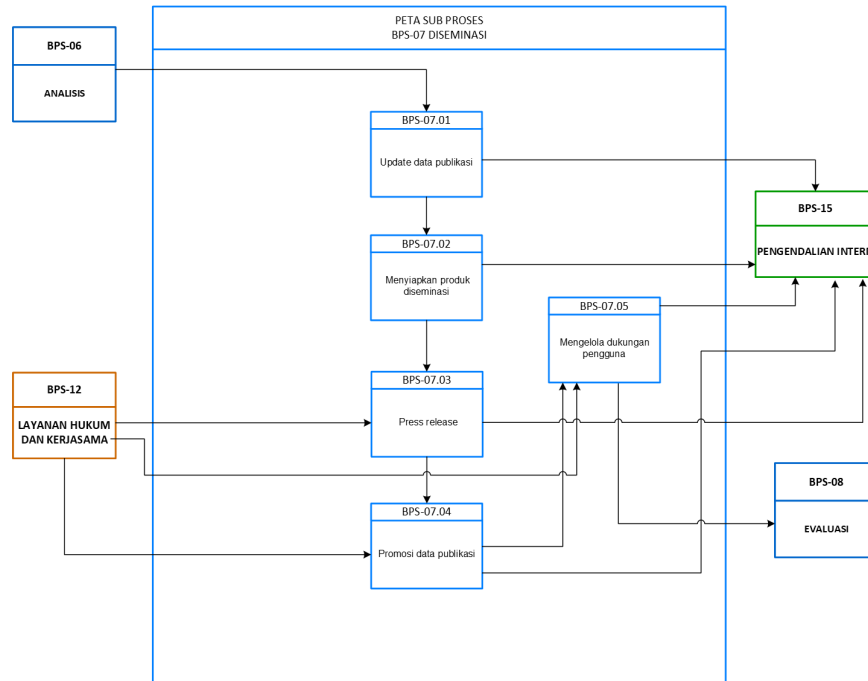
Gambar 8. Sub Peta Proses Bisnis Pengolahan

f. BPS-06 Analisis



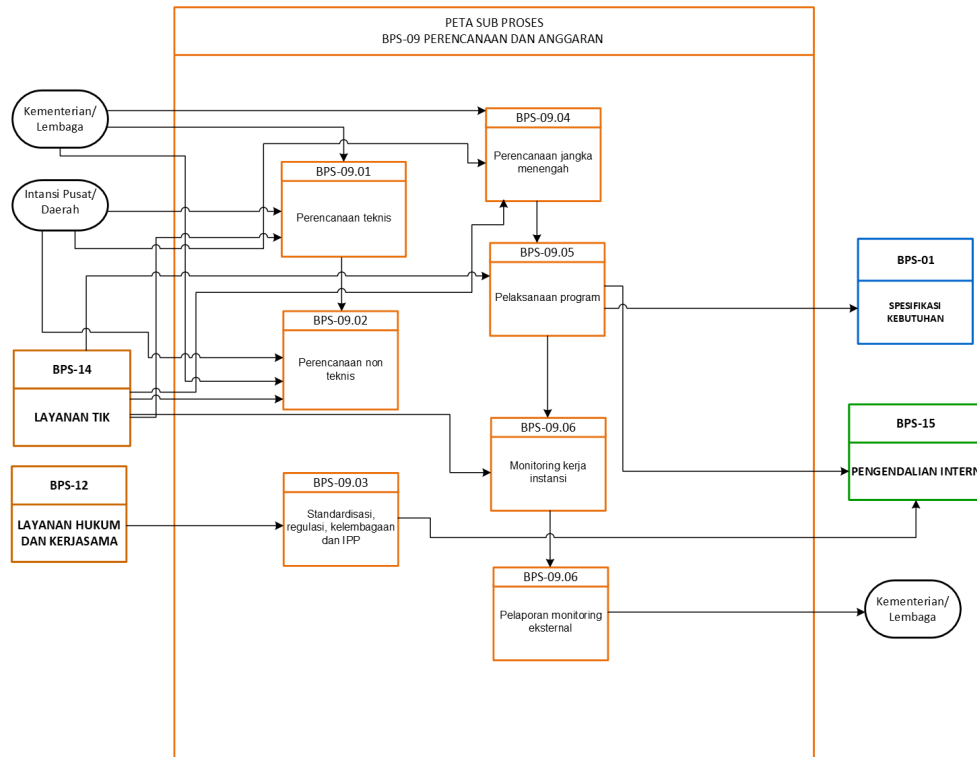
Gambar 9. Sub Peta Proses Bisnis Analisis

g. BPS-07 Diseminasi



Gambar 10. Sub Peta Proses Bisnis Diseminasi

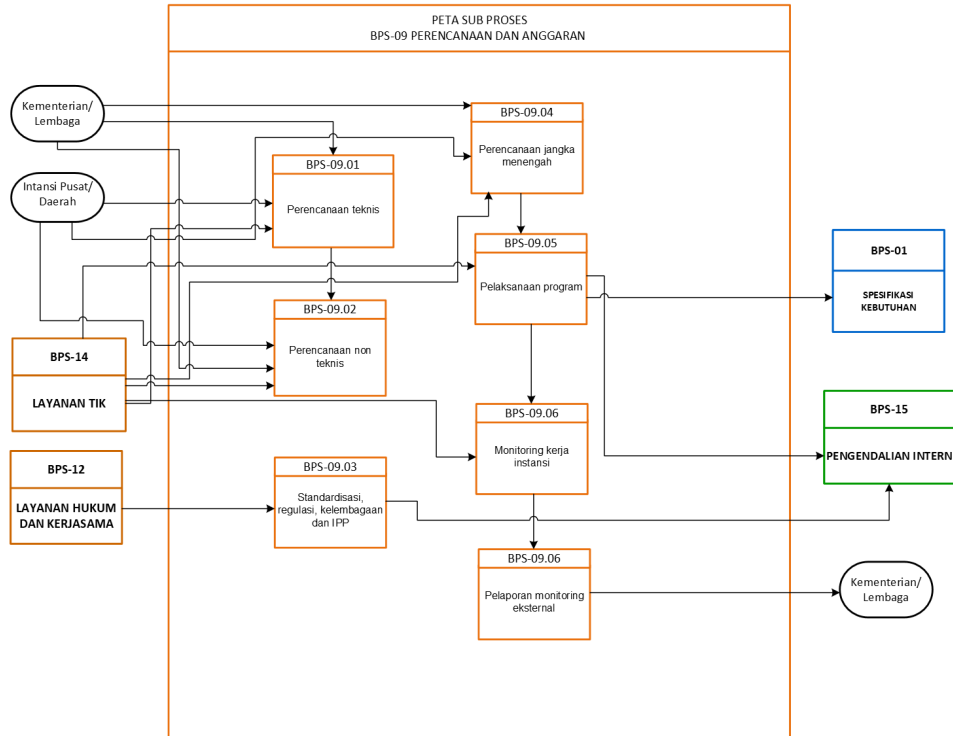
h. BPS-08 Evaluasi



Gambar 11. Sub Peta Proses Bisnis Evaluasi

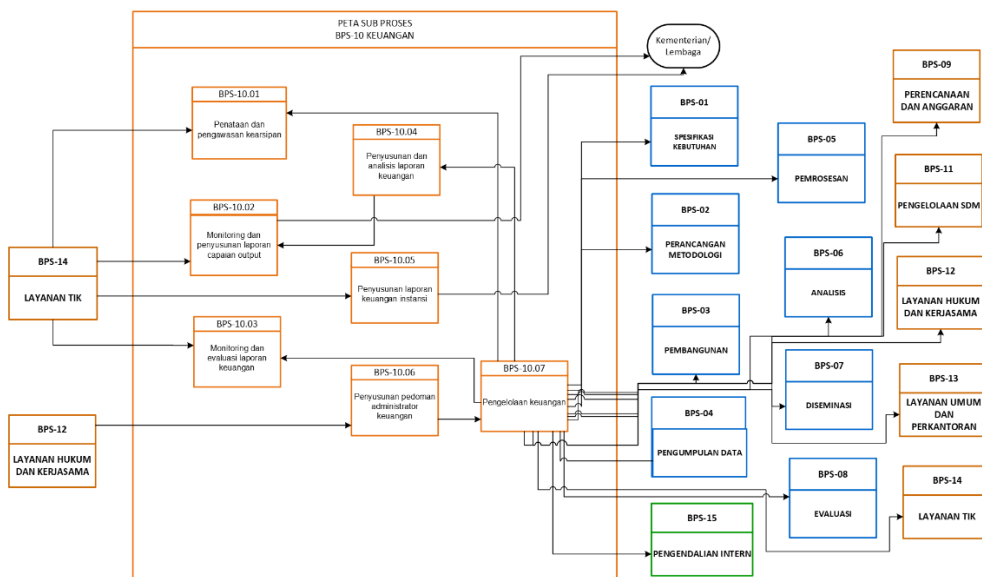
2. Proses Pendukung

a. BPS-09 Perencanaan dan Anggaran



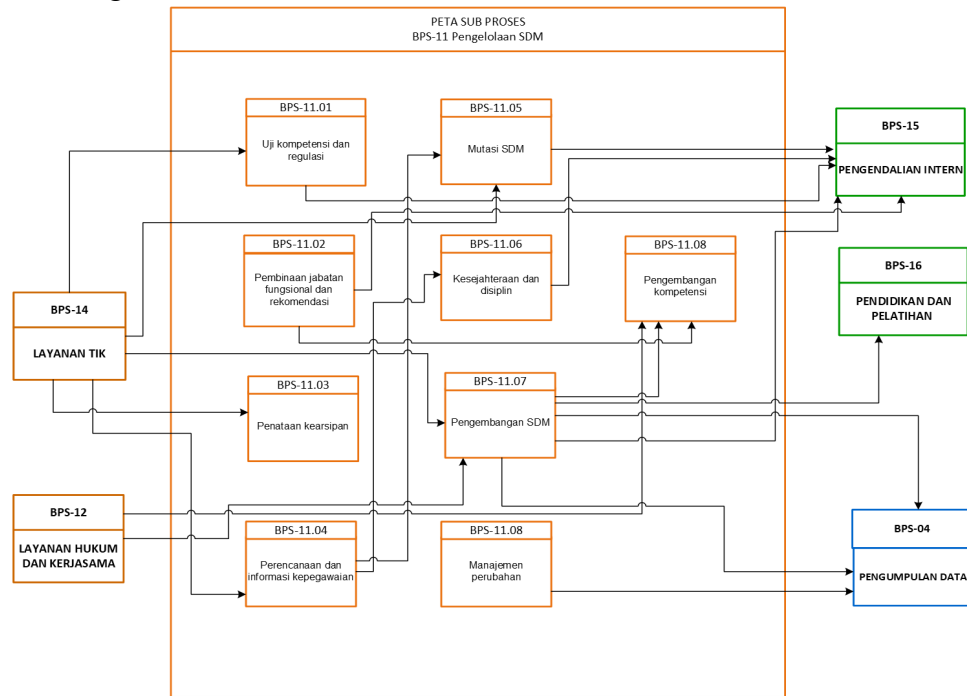
Gambar 12. Sub Peta Proses Bisnis Perencanaan dan Anggaran

b. BPS-10 Keuangan



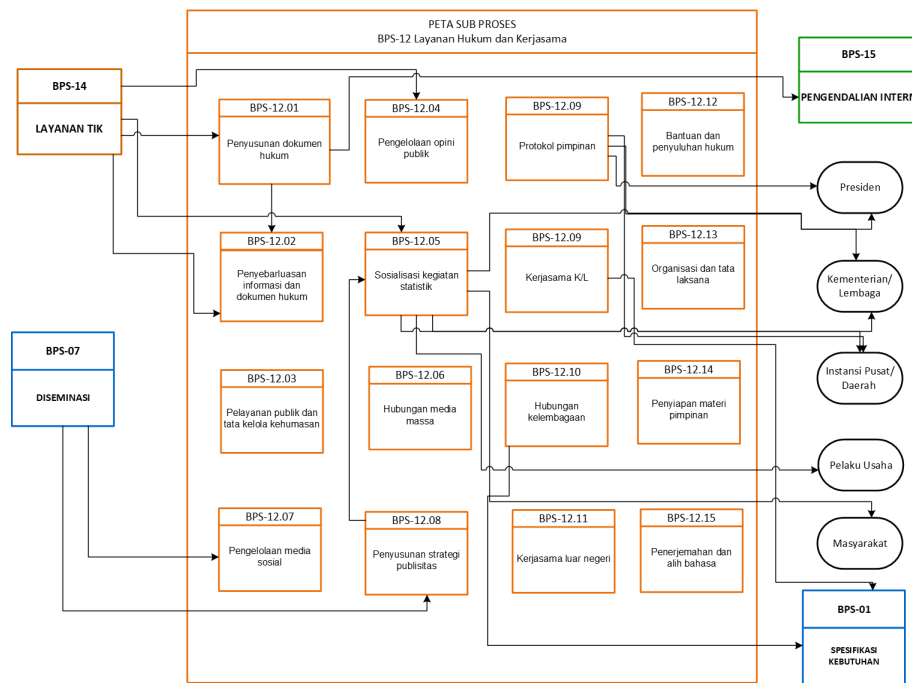
Gambar 13. Sub Peta Proses Bisnis Keuangan

c. BPS-11 Pengelolaan SDM



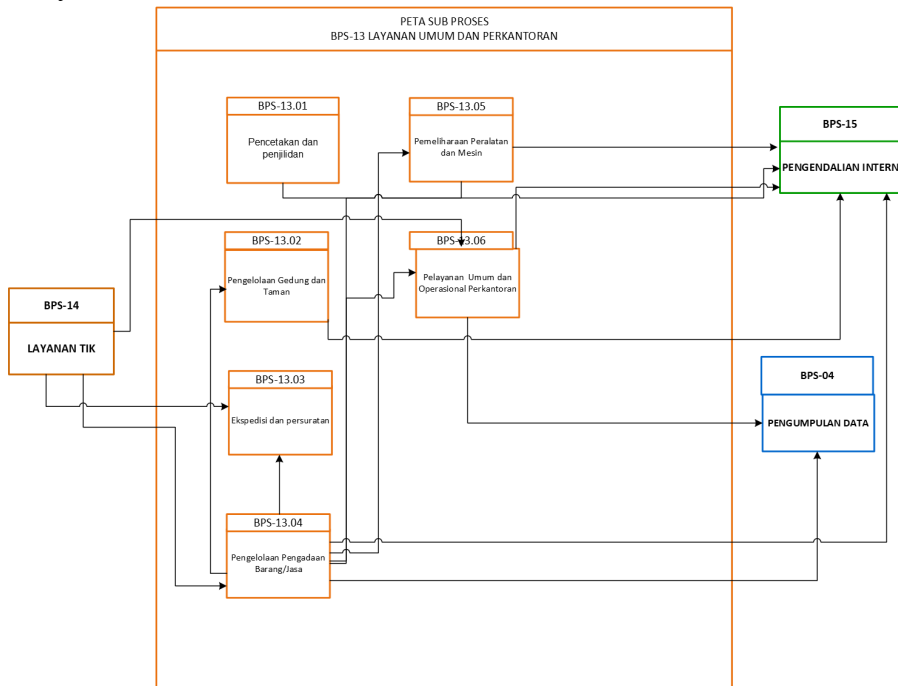
Gambar 14. Sub Peta Proses Bisnis Pengelolaan SDM

d. BPS-12 Layanan Hukum dan Kerjasama



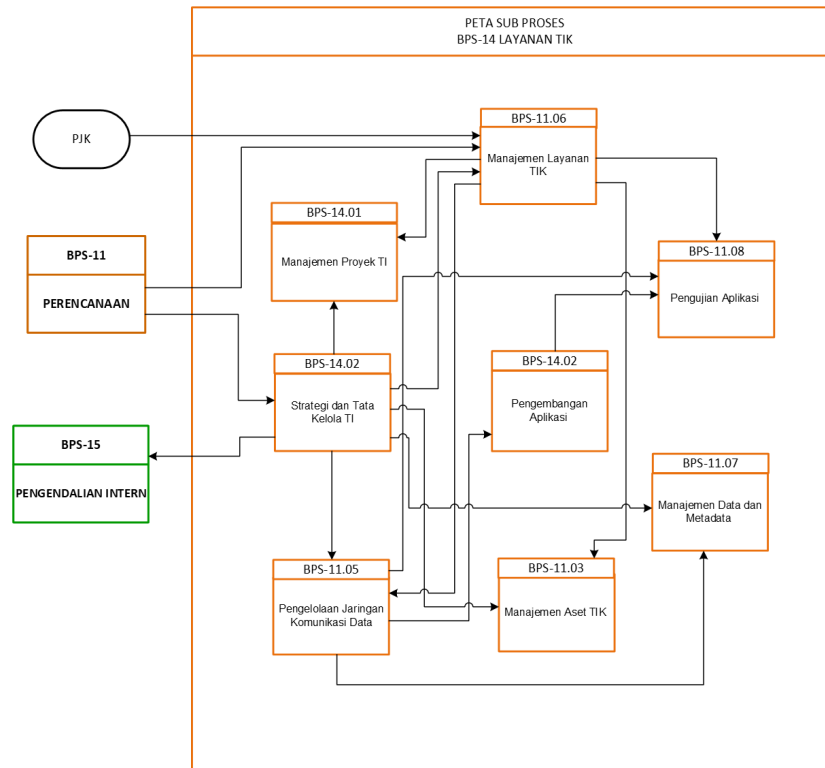
Gambar 15. Sub Peta Proses Bisnis Layanan Hukum dan Kerjasama

e. BPS-13 Layanan Umum dan Perkantoran



Gambar 16. Sub Peta Proses Bisnis Layanan Hukum dan Perkantoran

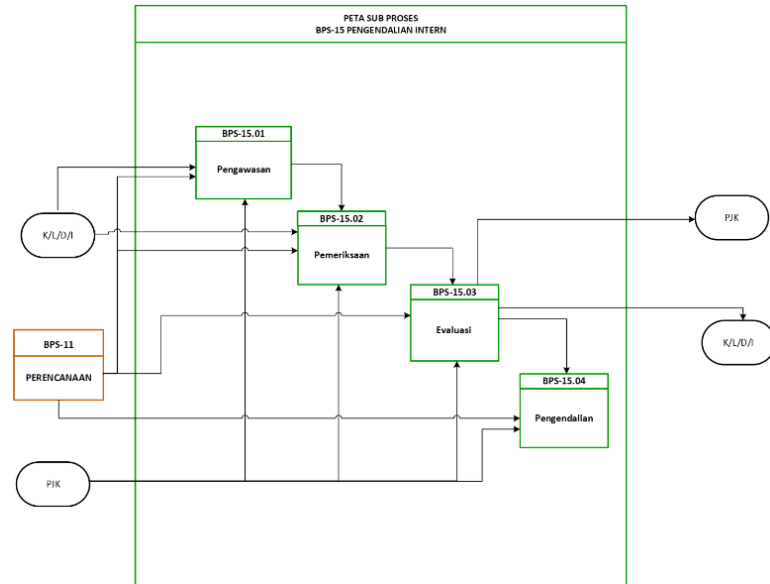
f. BPS-14 Layanan TIK



Gambar 17. Sub Peta Proses Bisnis Layanan TIK

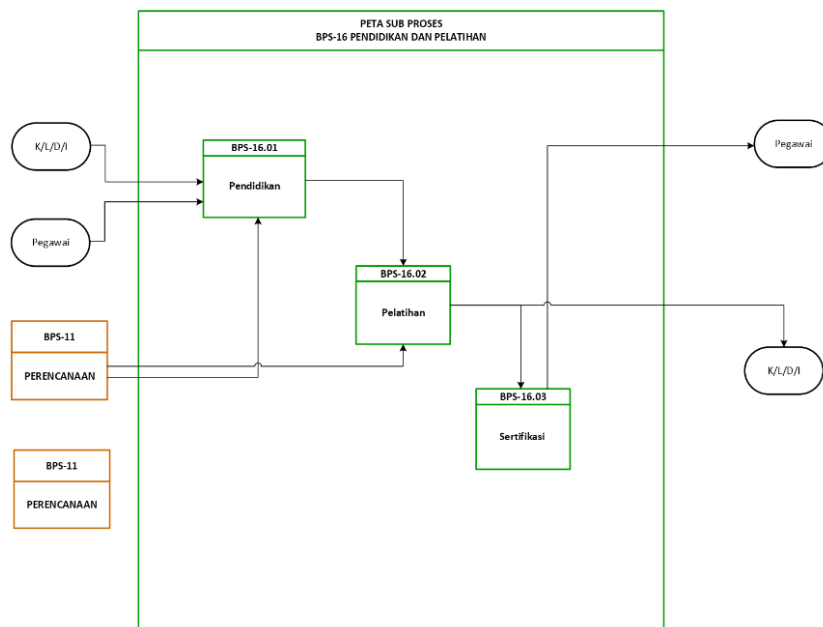
3. Proses Lainnya / Penguat

a. BPS-15 Pengendalian Intern



Gambar 18. Sub Peta Proses Bisnis Pengendalian Intern

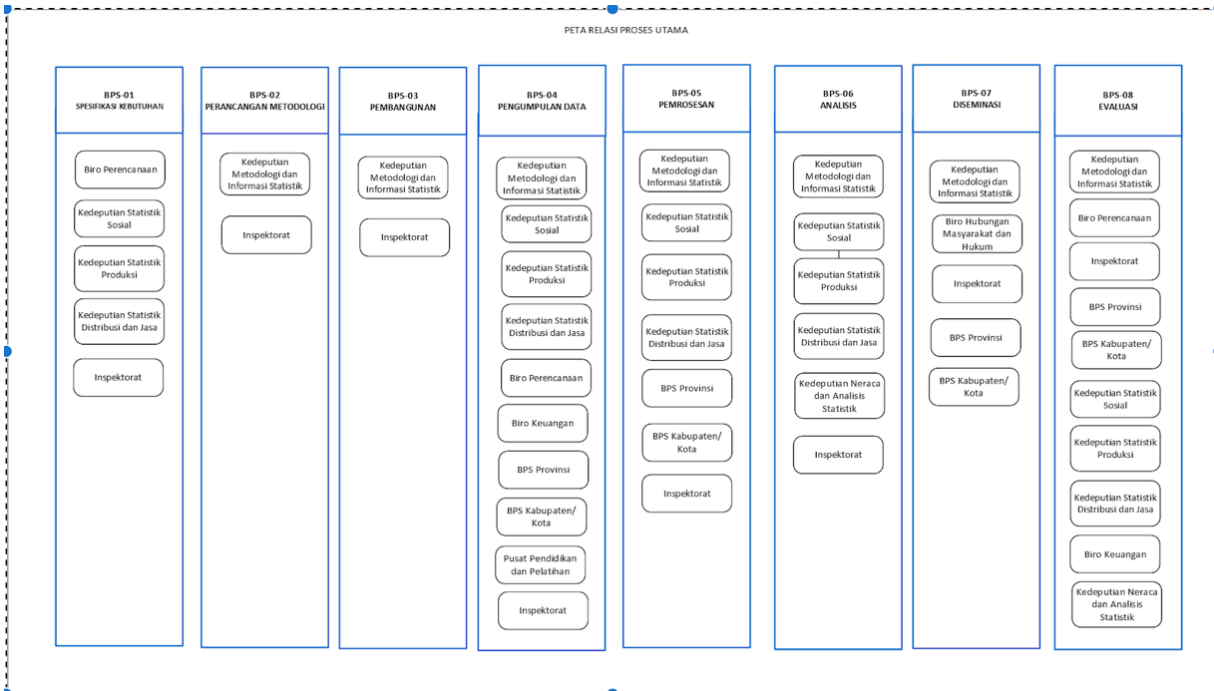
b. BPS-16 Pendidikan dan Pelatihan



Gambar 19. Sub Peta Proses Bisnis Pendidikan dan Pelatihan

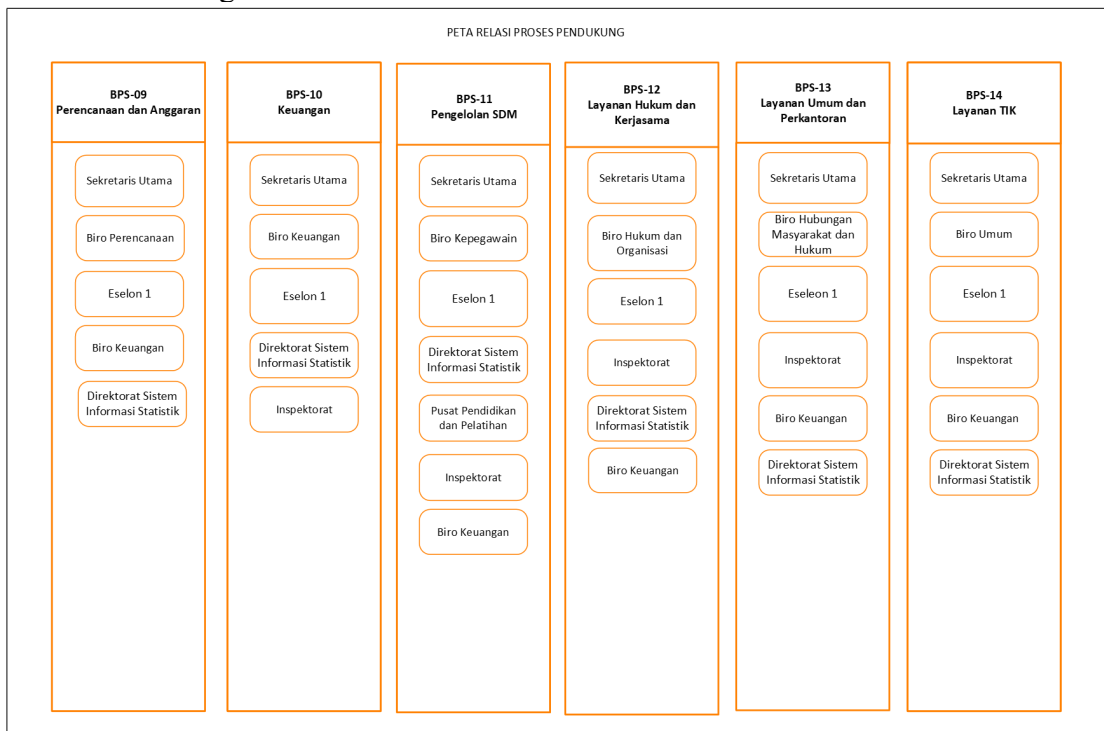
C. PETA RELASI

1. Proses Utama



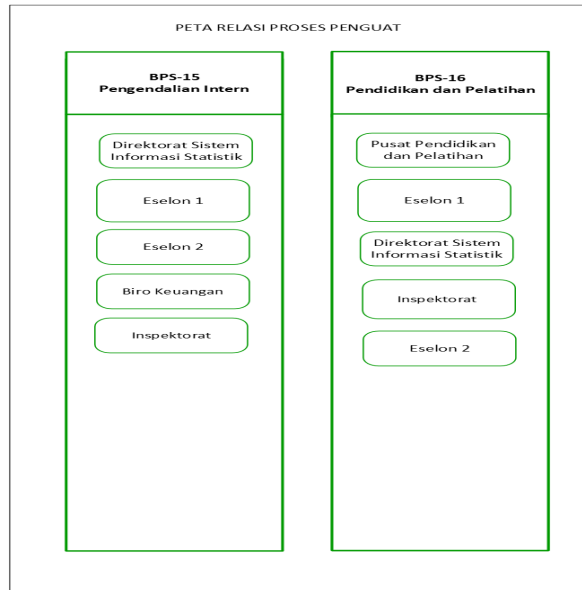
Gambar 20. Peta Relasi Proses Utama

2. Proses Pendukung



Gambar 21. Peta Relasi Proses Pendukung

3. Proses Penguat

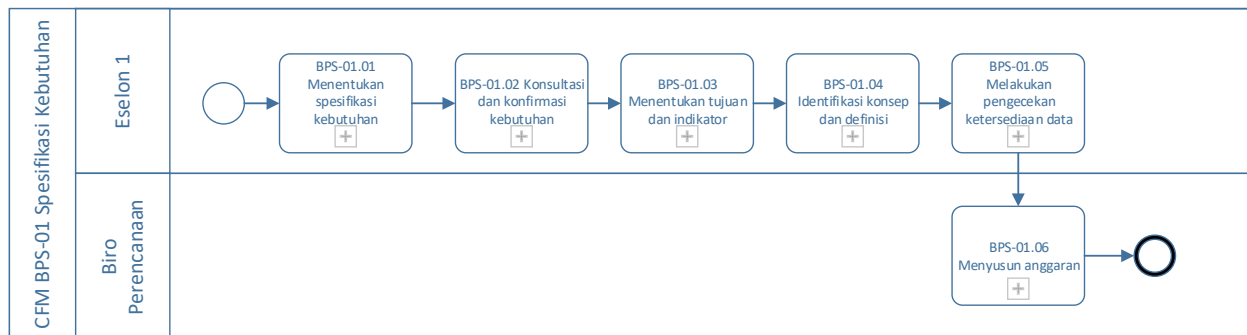


Gambar 22. Peta Relasi Proses Penguat

D. PETA LINTAS FUNGSI

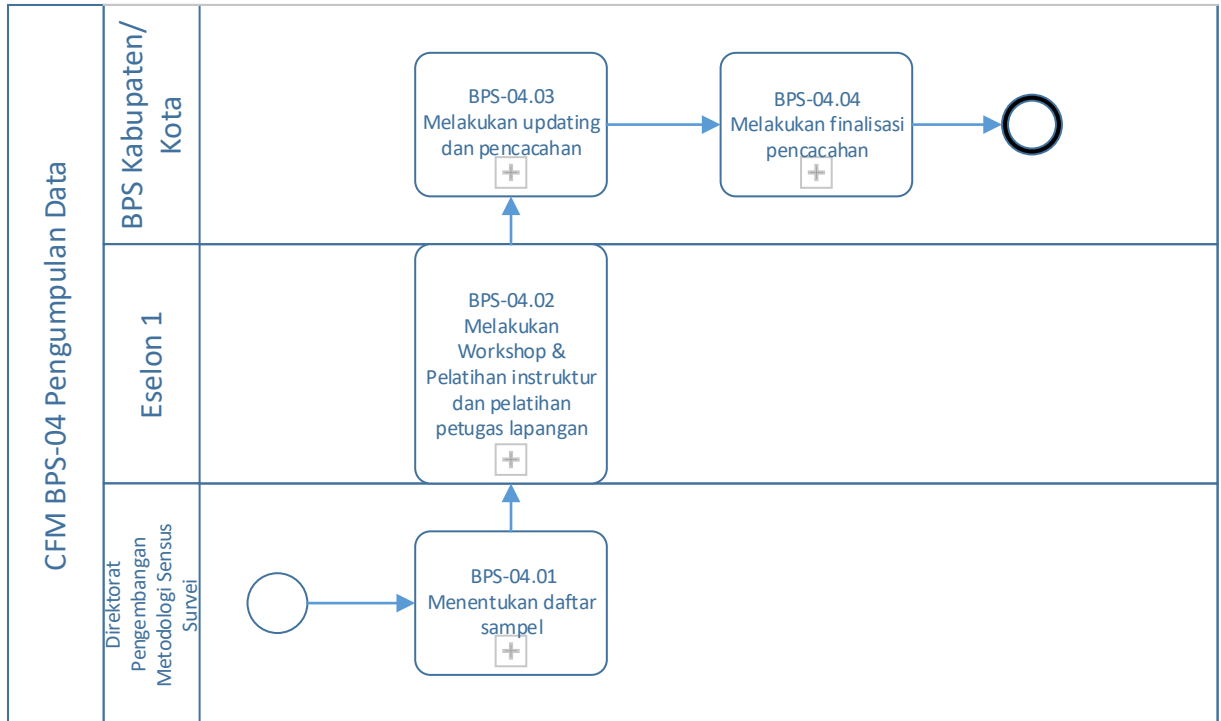
Berikut adalah contoh penggambaran Peta lintas fungsi dari sub proses utama:

1. BPS-01 Spesifikasi Kebutuhan



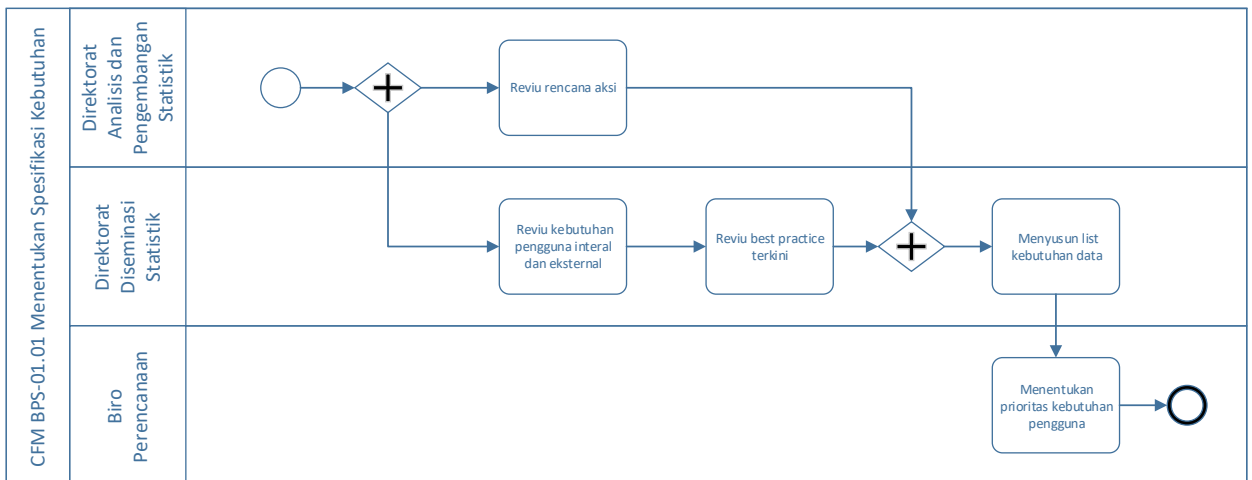
Gambar 23. Peta Lintas Fungsi Spesifikasi Kebutuhan

2. BPS-04 Pengumpulan Data



Gambar 24. Peta Lintas Fungsi Pengumpulan Data

3. BPS-01.01 Menentukan Spesifikasi Kebutuhan



Gambar 25. Peta Lintas Fungsi Menentukan Spesifikasi Kebutuhan

BAB III
PENYUSUNAN PROSES BISNIS
BADAN PUSAT STATISTIK

A. KAJIDAH PENGAMBARAN PROSES BISNIS

Penggambaran proses bisnis menggunakan prinsip levelling / Hirarki. Setiap proses bisnis yang digambarkan harus dapat dipetakan dalam blok peta proses bisnis atau proses bisnis harus merupakan turunan dari blok peta proses bisnis level-n yang telah disepakati. Penggambaran proses bisnis dapat mencakup sub proses bisnis dan sub sub proses dibawahnya sampai level terkecil yaitu SOP.

Penyusunan proses bisnis di lingkungan BPS dilakukan sesuai tahapan berikut :



Gambar 26. Tahap Penyusunan Peta Proses Bisnis BPS

1. Persiapan

a. Perencanaan

Perencanaan penyusunan proses bisnis meliputi aktifitas identifikasi kebutuhan penyusunan proses bisnis sekaligus menentukan cakupan penggambaran proses bisnis. Selain itu dalam proses perencanaan juga menentukan stakeholder yang berkaitan, serta jadwal pelaksanaan penyusunan proses bisnis

b. Pemetaan proses bisnis

Pemetaan proses merupakan upaya untuk mengelompokkan serangkaian aktivitas (proses) ke dalam kelompok (kotak) yang saling berhubungan sehingga memudahkan pengendalian kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Pemetaan proses berdampak pada terbentuknya hirarki proses (levelling proses). Hal ini memudahkan cakupan penggambaran/penyusunan proses supaya tidak terlalu luas/lebar dan fokus pada fungsi bisnis tertentu

c. Penyiapan instrumen pengumpulan informasi

Instrumen pengumpulan informasi disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ingin didapatkan dalam rangka penyusunan proses bisnis. Instrumen pengumpulan informasi proses bisnis dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan pengumpulan informasi dan kemungkinan implementasi

d. Pengumpulan Informasi

Penyusunan proses bisnis membutuhkan informasi dari pemilik proses bisnis untuk dapat diidentifikasi kapan proses bisnis dimulai, hal apa yang memicu proses dilakukan, bagaimana alur proses berjalan, kapan proses berakhir, dan siapa yang berperan, terlibat ataupun melaksanakan proses-proses tersebut.

Pengumpulan informasi dapat dilakukan menggunakan beberapa metode baik wawancara secara langsung ataupun meminta pemilik proses bisnis untuk memberikan informasi.

2. Penggambaran

Penggambaran proses bisnis dilakukan menggunakan instrumen penggambaran proses bisnis sesuai dengan standar notasi *Business Process Modelling Notation* (BPMN). Secara teknis penggambaran proses bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah berikut :

- Definitif, yakni suatu proses bisnis harus memiliki batasan kapan dimulai dan kapan berakhir, terdapat masukan, serta keluaran yang jelas
- Urutan, suatu proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.

- Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
- Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
- Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.

3. Reviu dan Pengesahan proses bisnis

Proses bisnis yang telah disusun dilakukan reviu dan disahkan oleh Pejabat Esselon 2.

Reviu terhadap proses bisnis dengan mempertimbangkan

1. Keselarasan dengan peta proses bisnis BPS;
2. Efektifitas dan efisiensi proses;
3. Kesesuaian dan kewajaran urutan proses bisnis; serta
4. Kemungkinan penerapan proses bisnis

4. Rekayasa / Pengembangan

merupakan proses penataan ulang proses bisnis beserta fundamentalnya secara radikal yang bertujuan untuk memberikan peningkatan secara dinamis yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. Rekayasa dan pengembangan proses bisnis bisa disebabkan karena adanya kebijakan baru organisasi, kebijakan eksternal, dan kebutuhan rekayasa atau pengembangan proses bisnis karena alasan tertentu oleh pemilik proses bisnis. Rekayasa proses bisnis harus memberikan nilai tambah yang baru. Hasil rekayasa proses bisnis disetujui dan disepakati oleh pemilik proses bisnis.




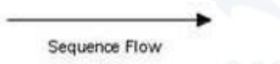
5. Monitoring dan Evaluasi

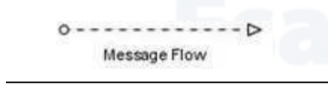

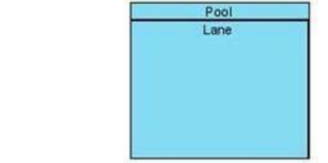


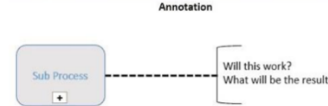
Evaluasi terhadap pengembangan proses bisnis di BPS bertujuan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang telah dirancang dan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan implementasi kegiatan sesuai dengan standar proses bisnis yang sudah dibuat dan ditetapkan.

B. STANDAR PENGAMBARAN PROSES BISNIS

Dalam rangka standardisasi proses bisnis serta untuk menghilangkan ambiguitas maka penggambaran proses bisnis pada sistem elektronik menggunakan standar Business Process Modelling Notation (BPMN). BPMN menyediakan solusi universal yang menggunakan teknik pemodelan standar dan simbol standar sehingga model proses dapat dibagikan dan dibaca dengan mudah oleh siapa saja, baik dari unit bisnis maupun unit TI. BPMN memberikan representasi visual yang mudah dipahami dari langkah-langkah yang terlibat dalam suatu proses, yang memberikan detail memadai untuk memungkinkan kemudahan dan keberhasilan implementasi. Dengan adanya keseragaman notasi maka akan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik dan sangat membantu saat mencoba meningkatkan efisiensi dan mengidentifikasi area untuk peningkatan. Standar notasi BPMN saat ini banyak ditemukan dalam berbagai sistem elektronik

Berikut adalah beberapa standar notasi BPMN yang dapat digunakan:

No	Bentuk Notasi	Nama	Penjelasan
1		Event	Event (peristiwa) direpresentasikan dengan lingkaran. Event dapat berupa Start (mulai), Intermediate (masih terdapat proses lain yang berjalan), atau End (selesai)
2		Activity	merepresentasikan pekerjaan (task) yang harus diselesaikan. Ada empat macam activity, yaitu task, looping task, sub process, dan looping subprocess. Penulisan kata pada task / proses/ sub proses adalah kata kerja
3		Gateways	memperlihatkan pilihan yang berbeda. Gateway juga menjelaskan mengenai percabangan dan penggabungan dari path yang ada.
4		Sequence flow	merepresentasikan pilihan default untuk menjalankan proses sebagai sebuah alur atau urutan

No	Bentuk Notasi	Nama	Penjelasan
5		Message flow	merepresentasikan aliran pesan antar proses.
6		association	digunakan untuk menghubungkan elemen dengan artifact.
7		Swimlane	<p>digunakan untuk mengkategorikan secara visual seluruh elemen dalam diagram. Ada dua jenis swimlanes, yaitu pool dan lane. Perbedaannya adalah lane terletak di bagian dalam pool untuk mengkategorisasi elemen-elemen di dalam pool menjadi lebih spesifik. Swimlane dapat digambarkan secara vertical atau horizontal</p> <p>Pool dapat berupa layanan, proses bisnis induk, area, wilayah dan hal-hal lain yang sifatnya batasan</p> <p>Lane adalah role / aktor yang menjalankan task/proses tersebut</p> <p>Biasanya Swimlane digunakan untuk menggambarkan CFM</p>
8		Data Object	digunakan untuk menjelaskan data apa yang dibutuhkan dalam proses.
9		Group	untuk mengelompokkan sejumlah aktivitas didalam proses tanpa mempengaruhi proses yang sedang berjalan.
10		Annotation	Annotation, digunakan untuk memberi catatan agar diagram menjadi lebih mudah dimengerti.

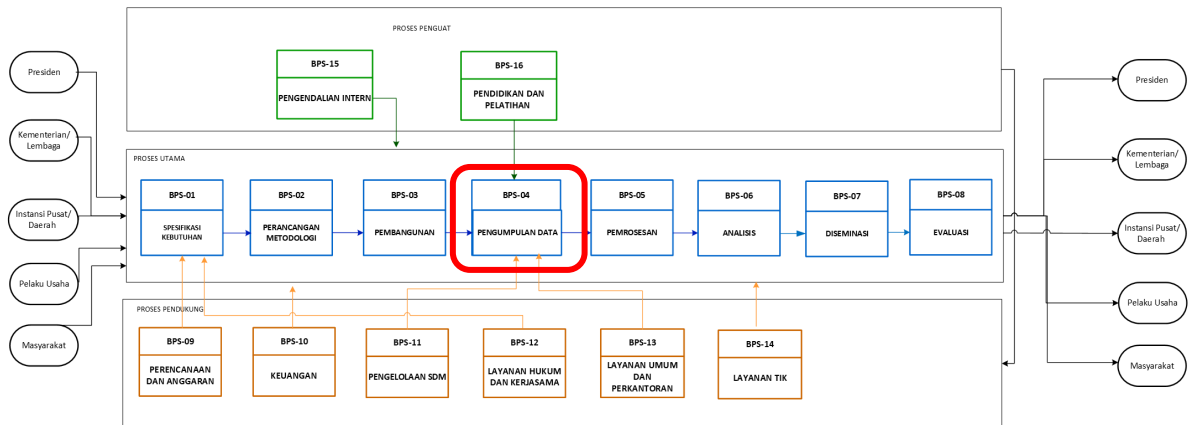
Tabel 1. Notasi Penggambaran Proses Bisnis Berdasarkan BPMN

C. SIMULASI PENGGAMBARAN PROSES BISNIS

Berikut adalah simulasi penggambaran proses bisnis dengan memperhatikan keselarasan dengan Peta Proses bisnis dan sesuai dengan standar. Lokus penggambaran proses bisnis adalah proses bisnis pengumpulan data menggunakan mekanisme CAPI

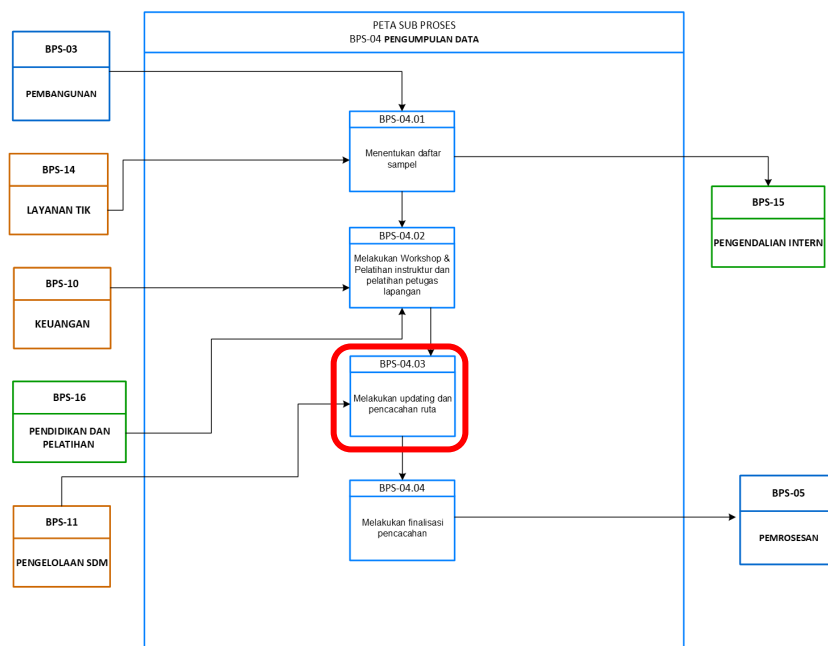
1. Memastikan bahwa proses yang digambarkan terdapat pada peta proses bisnis BPS dengan melihat hirarki

a. Peta Proses Bisnis Level (0)



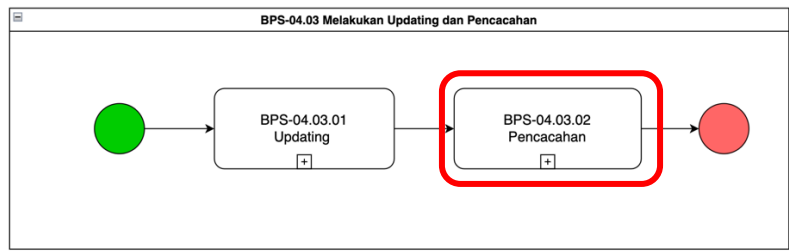
Gambar 27. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis (1)

b. Sub Peta Proses Level Pengumpulan Data (BPS-04)



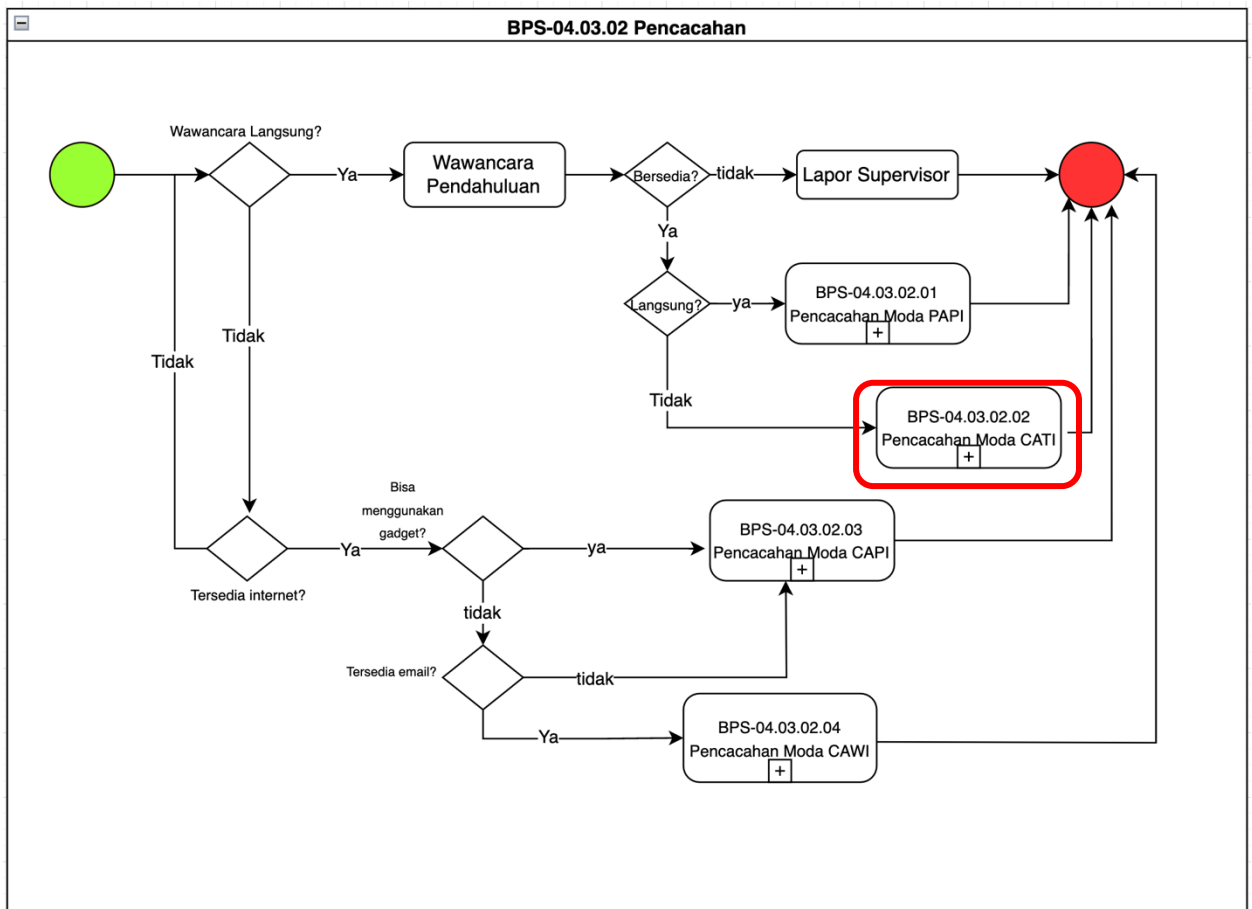
Gambar 28. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis (2)

c. Proses Bisnis Level n-2 (Proses Bisnis Melakukan Updating dan Pencacahan)



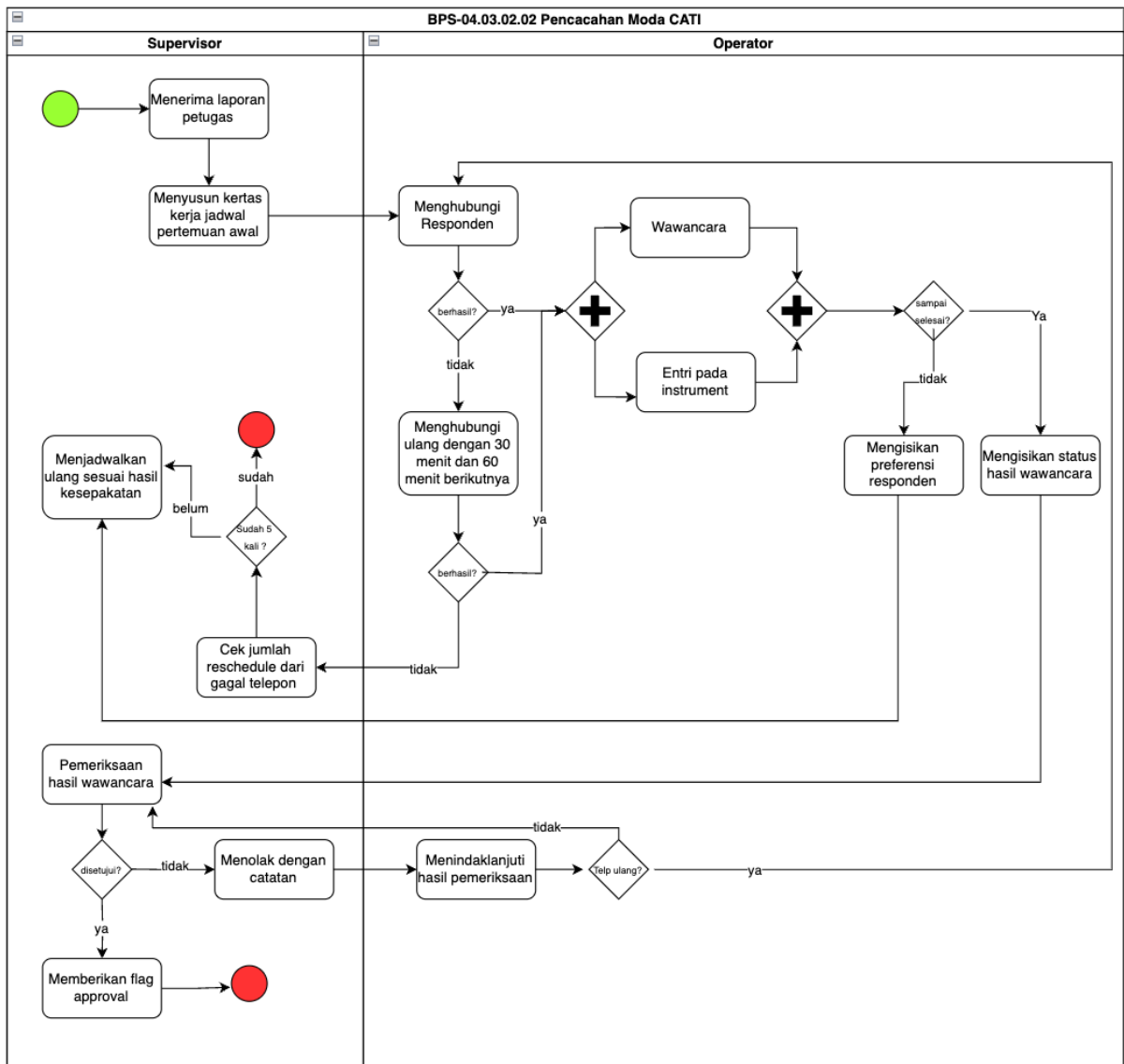
Gambar 29. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis 3)

d. Proses Bisnis Level n-1 (Proses Bisnis Pencacahan)



Gambar 30. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis (4)

e. Proses Bisnis Level n (Proses Bisnis Pencacahan Moda CATI)



Gambar 31. Tahapan Penggambaran Proses Bisnis (5)

Level penggambaran proses bisnis tergantung pada kedalaman proses. Proses bisnis paling kecil biasanya digambarkan dalam bentuk SOP dan ketentuan penggambaran SOP merujuk pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012.

BAB IV

PENUTUP

Panduan penyusunan proses bisnis di lingkungan Badan Pusat Statistik ini mencakup penjelasan terkait Peta Proses Bisnis BPS serta diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai panduan untuk menyusun proses bisnis setiap unit kerja di BPS. Melalui proses bisnis yang standar tentunya dapat mengurangi ketidak efisienan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan bisnis di BPS. Adapun proses bisnis hendaknya dapat selalu dimutakhirkan seiring dengan adanya perubahan kebijakan dan tata kelola, perkembangan tren teknologi serta kebutuhan akan modernisasi proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan khususnya di BPS.

PENYUSUN
TIM ARSITEKTUR SPBE BPS
Yulia Virantina, SST, MT
Nurul Izzah Af' adati